

**MODEL *PROJECT CITIZEN* DALAM MENINGKATKAN KECAKAPAN  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PENGEMBANGAN NILAI  
NILAI KARAKTER BUDAYA BANGSA**

**Sulaiman, Nurmasiyah**

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah, Banda Aceh

sulaiman@unsyiah.ac.id

**ABSTRACT**

*Character development which is an effort to realize the mandate of the Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution is motivated by the reality of the national problems that are developing at this time, such as: disorientation and not living the values of Pancasila; the limitations of integrated policy tools in realizing the values of Pancasila; shifting ethical values in the life of the nation and state; waning awareness of national cultural values; the threat of national disintegration; and the weakening of the nation's independence (National Policy Master Book for the Development of the Nation's Cultural Character 2010-2025). To support the realization of the ideals of character development as mandated in the Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution and to overcome the current national problems, the Government has made character development as one of the national development priority programs. That spirit is implicitly emphasized in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) for 2005-2015, where character education is placed as a foundation for realizing the vision of national development, namely "realizing a society of noble, moral, ethical, cultured, and civilized based on the Pancasila philosophy. " One model that can develop national cultural character values through citizenship education is the Project citizen model, which is a portfolio-based learning model. Through this model students are not only invited to understand scientific concepts and principles, but also develop their ability to work cooperatively through empirical practice learning activities. thus learning will be increasingly challenging, activating and more meaningful*

**Keywords:** *project citizen model, citizenship education skills, character.*

**Pendahuluan**

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan

baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa tentunya harus memiliki pengetahuan yang kuat akan dinamika kehidupan kebangsaan sudah tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Dalam kacamata kewarganegaraan mahasiswa diyakini sebagai warga negara baru tumbuh, yakni warga negara yang masih harus dididik menjadi seorang yang sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terlebih karakter budaya bangsa sangat harus dimiliki oleh generasi muda yang kelak akan menjalankan roda kehidupan negeri ini.

Salah satu model pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman nilai nilai karakter budaya bangsa bagi mahasiswa adalah dengan model *Project citizen*, yaitu sebuah model pembelajaran berbasis portofolio. Melalui model ini para mahasiswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik empirik, dengan demikian pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan dan lebih bermakna.

## **Pembahasan**

Proses belajar sangat berkaitan dengan perkembangan mental anak yang tidak terlepas dari aktifitasnya. Dengan demikian perkembangan mental anak tergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanfaatkan langsung alat atau media belajar lain (Suparno, 1997:40). Perkembangan mental bukan merupakan bagian dari kepingan informasi terpisah, namun lebih merupakan pengkonstruksian suatu kerangka mental oleh mahasiswa untuk memahami lingkungan mereka, sehingga mahasiswa bebas membangun pemahaman mereka sendiri.

Hal ini juga untuk meningkatkan standar nasional pendidikan karena masih rendahnya mutu sebagaimana dikatakan oleh Chaedar A (2013.14) ” *BSNP or the board of national education standar oversees the standards of educations all over the country. The eight nations standard of education. Are already set up and all school use it for benchmarking. The standard are perceived differently by both groups of teachers. On the*

*national standard of educations secondary teacher believe that the standard are: (1) not met yet (64.42%), (2) are appropriate (17.4%), (3) Are too high to achive (15,0), and (4) are already achieved (3.2%)*

Salah satu model pembelajaran dalam meningkatkan mutu PKn adalah model *Project citizen*, yaitu sebuah model pembelajaran berbasis potofolio, Melalui model ini para mahasiswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik. dengan demikian pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan dan lebih bermakna

Langkah-langkah inovasi pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran *Project Citizen*.

Langkah 1 - Identifikasi Masalah.

Membagi siswa menjadi 10 kelompok (masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa).Tiap kelompok mengidentifikasi permasalahan yang termasuk kebijakan publik yang terdapat di daerahnya ( tiap kelompok mengusulkan 1 masalah ) Kumpulkan semua permasalahan tersebut, dan tuliskan di papan tulis.

Langkah 2 - Memilih masalah

Setiap siswa memilih 3 masalah (1 sampai 3 vote ) Jumlahkan perolehan suara dari masing-masing permasalahan tersebut. Apabila jumlah suara yang diperoleh oleh ranking pertama belum mencapai jumlah 50% plus 1, maka selanjutnya diadakan pemilihan tahap 3 untuk mendapatkan satu masalah sebagai bahan kajian kelas Setelah didapatkan masalah yang akan dikaji, selanjutnya bagi di kelas menjadi 4 kelompok portofolio. Tiap kelompok portofolio bertugas membuat 2 laporan portofolio, yakni Portofolio tayangan (untuk show case) dan Dokumen Portofolio ( laporan penelitian dan data pendukung, berupa hasil wawancara, kajian pustaka, klipping dan lain lain ). Tugas Masing-masing kelompok Portofolio : a. Kelompok Portofolio 1 menjelaskan Masalah, latar belakang masalah dan pentingnya masalah tersebut menjadi bahan kajian. b. Kelompok Portofolio 2 mengkaji Kebijakan alternatif kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan penilaian atas kebijakan yang sudah ada /

yang sedang disusun. c. Kelompok Portofolio 3 mengusulkan kebijakan alternatif. d. Kelompok Portofolio 4 mengembangkan rencana kerja Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara untuk membuat pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan.

### Langkah 3 - Mengumpulkan Informasi

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, tiap kelompok hendaknya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik melalui kajian pustaka, observasi, wawancara dan informasi dari sumber-sumber lain yang relevan.

Berikut adalah contoh sumber informasi: 1. Undang-undang; 2. Perpustakaan; 3. Koran/majalah; 4. Profesor dan pakar; 5. Profesional (Polisi, Hakim, psikolog dan lain lain); 6. Organisasi masyarakat / LSM; 7. Tokoh agama / tokoh masyarakat; 8. Jaringan informasi Elektronik; dan 9. Instansi pemerintah.

### Langkah 4 - Mengembangkan Portofolio Kelompok

Untuk memasuki tahapan ini, tiap kelompok portofolio harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Tiap kelompok portofolio membuat laporan, terdiri dari : 1. Bagian Tayangan Laporan ini berupa sebuah panel portofolio terbuat dari kardus bekas, styrofoam atau bahan lain dengan ukuran tidak lebih dari 90cm x 80 cm. bagian ini berisi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar dari sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto karya seni dll. 2. Bagian Dokumentasi Bagian ini berisi laporan penelitian kelompok dengan melampirkan data pendukung hasil kajian pustaka, wawancara dan observasi Setelah semua kelompok menyelesaikan laporannya, Panel Portofolio tayangan tiap kelompok dirangkai sehingga menjadi satu dokumen portofolio tayangan kelas.

### Langkah 5 - Menyajikan Portofolio

Tujuan kegiatan ini adalah membekali pengalaman kepada siswa tentang cara menyampaikan gagasan kepada orang lain, serta bagaimana meyakinkan orang lain terhadap langkah-langkah yang akan diambil.

Dalam sesi ini tiap kelompok mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan hadirin dan dewan juri, yang populer disebut *SHOWCASE*. Presentasi dilakukan secara

bergantian mulai dari kelompok portofolio 1, 2, 3 dan terakhir kelompok. Untuk memotivasi siswa, guru dapat menghadirkan beberapa guru lain, tokoh masyarakat atau para ahli sebagai peninjau dan dewan juri, sementara guru bidang studi bertindak sebagai moderator. Setelah presentasi dilakukan, dewan juri mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji hasil penelitian siswa. Untuk menghidupkan suasana, sebelum presentasi tiap kelompok memperkenalkan diri dan meneriakkan yel-yel kelompoknya dan setelah presentasi melakukan pentas seni. Kemudian mereka diharapkan lebih aktif.

#### Langkah 6 - Refleksi Pengalaman Belajar

Refleksi pengalaman belajar dilakukan setelah semua kelompok melakukan presentasi. Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas model pembelajaran ini dalam meningkatkan kemampuan siswa serta untuk menghindari terjadinya kesalahan. Sebagai penutup acara, dewan juri memberikan penilaian presentasi tiap kelompok (Budimansyah, 2009:33)

Menurut Fauzi dalam Budimansyah (2009: 2), dengan model *project citizen* dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap apa yang dikaji khususnya tentang kewarganegaraan. Program tersebut mendorong para mahasiswa untuk terlibat aktif dengan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan persoalan di Jurusan PGSD atau masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggungjawab.

Budimansyah (2002: 8) menyebutkan ada beberapa prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio yaitu: Pertama, prinsip belajar mahasiswa aktif (*rodent active learning*). Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio berpusat pada mahasiswa. Dengan demikian, model ini menganut prinsip belajar mahasiswa aktif. Aktifitas mahasiswa hampir di seluruh proses : pembelajaran, dari mulai fase perencanaan aktivitas mahasiswa terlibat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (*brain storming*). Setiap mahasiswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, disamping itu tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, mahasiswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian rombongan belajar. Dalam kegiatan lapangan, aktifitas mahasiswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik(misalnya dengan wawancara,

pengamatan, kuesioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi bahan kajian rombongan belajar mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat sketsa, mempersiapkan kliping, dan jika diperlukan maka sebuah peristiwa penting dapat direkam dengan kamera. Pada fase pelaporan aktifitas mereka terfokus pada pembuatan portofolio rombongan belajar. Berbagai data dan informasi yang telah di dapat kemudian disusun secara sistematis dan disimpan pada sebuah *map ordner*.

Data dan informasi yang paling penting dan menarik adalah ketika data dan informasi ditempel pada portofolio seksi penayangan, yaitu papan panel yang terbuat dari kardus bekas atau bahan lain yang tersedia. Setelah portofolio selesai dibuat, dilakukanlah *public hearing* dalam kegiatan *showcase* dihadapan dewan juri. Kegiatan (*showcase*) merupakan puncak penampilan mahasiswa, karena pada tahap ini, hasil pekerjaan mahasiswa akan diuji dan diperdebatkan dihadapan dewan juri. Dan sebagai langkah terakhir dari *Project Citizen* ini adalah melakukan refleksi pengalaman belajar.

Kedua, kelompok belajar kooperatif (*cooperative learning*). Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama dilakukan antar mahasiswa dan antar komponen-komponen lain di lingkungan pendidikan, termasuk kerjasama jurusan PGSD dengan orang tua dan lembaga terkait.

Ketiga, pembelajaran partisipatorik. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini mahasiswa belajar sambil melakukan (*learning by doing*). Salah satu bentuk perlakuan itu adalah mahasiswa belajar hidup berdemokrasi. Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk bahan kajian rombongan belajar, nampak bahwa mahasiswa saling menghargai atas keputusan yang diambil oleh teman-temannya yang lain saat melakukan pemilihan bahan kajian rombongan belajar. Kemudian, pada saat berlangsungnya diskusi, mahasiswa belajar mengemukakan kan pendapat, mendengar pendapat orang lain, menyampaikan kritik serta sebaliknya belajar menerima kritik. Sehingga dalam hal ini, mahasiswa benar-benar ikut serta dalam proses pembelajaran.

Keempat, mengajar yang reaktif (*reactive teaching*). Untuk menerapkan model pembelajaran berbasis portofolio dosen perlu menciptakan strategi yang tepat agar mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang seperti itu akan dapat tercipta apabila dosen dapat meyakinkan mahasiswa mengenai materi yang sedang dipelajari bahwa akan berguna untuk kehidupan nyata. Kemudian, dosen juga dituntut untuk dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran yang disampaikan selalu menarik dan tidak membosankan. Dosen juga harus mempunyai sensitifitas yang tinggi untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan bagi mahasiswa

Kelima, *democratic learning*. Pembelajaran PKn berbasis portofolio mendukung penciptaan *democratic learning*, yang artinya pembelajaran PKn merupakan wahana pembelajaran demokrasi dalam rangka mengembangkan mahasiswa menjadi warga negara demokratis yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Dalam pembelajaran PKn berbasis portofolio sebagai *democratic learning*, merupakan kegiatan pembelajaran yang berbasis masalah (*social issues or problems*) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), watak (*disposition*) kewarganegaraan yang demokratis dan memungkinkan dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sipil yang beradab.

Perkembangan Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang di kenal sekarang ini dimulai pada tahun 1957 yang diberi nama Kewarganegaraan. tahun 1959 dengan nama *Civics*, tahun 1962 dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tahun "1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maka penamaannya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa PKn wajib dimuat dalam pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa ""Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran PKn meliputi Standar Kompetensi

Dasar. Dalam standar isi dijelaskan ruang lingkup PKn yang meliputi: aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga Negara
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.



Menurut Numan Somantri (2001: 279) pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis..., Pancasila sejati. Azis Wahab (1996) lebih lanjut mengemukakan bahwa warga Negara yang baik adalah warga Negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara di sekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab. yang melahirkan manusia Indonesia yang kompetitif.

Insan kompetitif menurut Azwar Idham dalam Budimansyah; (2011 : 61 ) adalah 1) berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan 2) bersemangat juang tinggi 3) mandiri 4) pantang menyerah 5) pembangun dan pembina jejaring 6) bersahabat dengan perubahan. 7) inovatif dan menjadi agen perubahan 8) produktif. 9) sadar Mutu 10). Berorientasi global 11). Pembelajaran sepanjang hayat

Kompetensi Kecakapan kewarganegaraan yang dimaksud sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2009), yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional Branson (1998:16)

Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic skill*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh *Civic Education* yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan atau menggambarkan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem *checks and balances* atau *judicial review* menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan

mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama.

*Civic Education* yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan sebagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensial, sistem *checks and balances*, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisis ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Dalam masyarakat yang otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.

Di samping mengisyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dalam *civil society*. Kecakapan-kecakapan tersebut jika meminjam istilah Branson (1998: 9) dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. Interaksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Monitoring juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara. Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal

mempengaruhi, mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan baik proses-proses formal maupun informal dalam masyarakat.

Istilah karakter sering dikaitkan dengan sikap, pola perilaku dan atau kebiasaan yang mempengaruhi interaksi seseorang terhadap lingkungan. Karakter menentukan sikap, perkataan dan tindakan. Hampir setiap masalah dan kesuksesanyang dicapai seseorang ditentukan oleh karakter yang dimiliki.(pupuh fathurahrohman,2013: 115)

Persoalan nilai nilai karakter budaya bangsa di era global sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami oleh Indonesia. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang tak tertandingi pun harus berdaya upaya sekeras-kerasnya dalam membangun nilai nilai karakter budaya bangsa di kalangan warganya. Demikian pula dengan negara-negara lain. Bahkan Malaysia, misalnya, beberapa waktu belakangan ini tengah ramai diskusi dan program tentang pembangunan nilai nilai karakter budaya bangsa di negara tersebut

Memperhatikan kenyataan di atas dimana masalah pembangunan nilai nilai karakter budaya bangsa saat ini tengah menghadapi tantangan yang berat, maka perlu dimulai upaya-upaya untuk kembali mengangkat tema tentang pembangunan nilai nilai karakter budaya bangsa. Apalagi di sisi lain, pembahasan atau diskusi tentang nilai nilai karakter budaya bangsa di Indonesia justru kurang berkembang (atau mungkin memang kurang dikembangkan)

Dalam memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, pemerintah sebenarnya menidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, budaya dan falsafah bangsa, yaitu (1) regejus, (2), jujur, (3), toleransi, (4), disiplin, (5), kerja keras (6) kreatif (7), mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) menghargai prestasi (13) persahabatan/kumunikatif, (14) cinta damai, (15)gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial dan (18) tanggung jawab (Amirulloh syarbini, 2012: 25 )

## **Simpulan**

Salah satu model yang dapat mengembangkan nilai nilai karakter budaya bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan adalah model *Project citizen*, yaitu sebuah model pembelajaran berbasis potofolio, Melalui model ini para mahasiswa bukan hanya diajak

untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik. dengan demikian pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan dan lebih bermakna yang terdiri dari enam langkah yaitu: Langkah 1 Identifikasi Masalah, Langkah 2 Memilih masalah, Langkah 3 Mengumpulkan Informasi Langkah 4 Mengembangkan Portofolio Kelompok Langkah 5 Menyajikan Portofolio Langkah 6 Refleksi Pengalaman Belajar

Dalam memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, pemerintah sebenarnya menidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, budaya dan falsafah bangsa, yaitu (1) regejus, (2), jujur, (3), toleransi, (4), disiplin, (5), kerja keras (6) kreatif (7), mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) menghargai prestasi (13) persahabatan/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial dan (18) tanggung jawab

### Referensi

- Azwar, Idham. (2011). Pengaruh pengembangan budaya kewarganegaraan melalui kegiatan ekstra kurikuler terhadap pengembangan sikap patriotisme. *Acta civicus*, 5(1).
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Budimansyah, D. (2009). *Project Citizen*. Bandung: UPI.
- Budimansyah, D. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*. Bandung: PT. Genesindo.
- Fauzi. G. (2014) The contribution of direct election for local leaders to the coruptions In Indonesia : lesson learned From Indonesia democratic syistem. *Internasional Journal of Educations*, 7(2).
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparno. (1997) . *Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: UPI Press.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007), Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Internasional. *Acta Civicus*, 1, 1-2.